

BAB IV

KONSEP MULTIKULTURALISME DALAM PIAGAM MADINAH DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Multikulturalisme dalam Piagam Madinah

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya.¹ Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam

¹ Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," *Makalah*. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, hlm. 1.

masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Kebudayaan merupakan sebuah cara untuk memahami maupun mengorganisasikan kehidupan manusia. Keadaan dimana masyarakat yang majemuk membawa kita untuk siap menghadapi konflik antar kelompok, Konflik yang terjadi menunjukkan adanya ketegangan sosial yang terjadi dalam Masyarakat yang beranekaragam. Untuk itu adanya

pemahaman yang merujuk kepada keanekaragaman baik suku, budaya, agama dan yang lain sebagainya sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia.

Sejarah etimologis istilah multikulturalisme belum berumur lama, menurut *Longer Oxford Dictionary* istilah multikulturalisme berkembang dari multikultural sebuah istilah yang mulai digunakan orang kebanyakan pada tahun 1950 an di Kanada.²

Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep untuk dijadikan acuan guna memahami dan mengembang luaskannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memahami multikulturalisme, diperlukan landasan

² Doni Gahrial, *Pendidikan Memang Multikultural*; beberapa gagasan, (Jakarta; Sein Estetika dan Teknologi; SET, 2002) 3.

pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan, dan mendukung keberadaan, serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia.

Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang manusia. Karena hampir semua negara didunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan. Dalam arti perbedaan menjadi asasnya dan kebijakan multikultural sebagai politik pengolahan perbedaan kebudayaan.

Multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, dan agama. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam.³

Sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai

³Ngainun Na'im dan Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 126.

struktur kegiatan manusia yang mencakup dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, bisnis, dan berbagai kegiatan yang lainnya. Untuk itu, multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politic of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya.

Adapun Piagam Madinah yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW, Menurut Ibnu Hisyam dalam kitab syarahnya Sirah Nabawiyah, piagam Madinah merupakan suatu konstitusi yang dibuat oleh Rasulullah dalam membangun peradaban kota Madinah, menurut Imam Ali ra kesahihan piagam madinah berada setelah al-Qur'an, yang terdiri dari 47 pasal yang menjelaskan tentang tatanan masyarakat sosial Madinah.

Adapun prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah ini adalah sebagai berikut:

Pertama, prinsip persatuan dan persaudaraan antar keberagaman suku serta berlaku adil satu sama lain, yang termaktub dalam piagam tersebut pada pasal 1-10.⁴ Prinsip ini sesuai dengan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”(Q.S. al-Nahl(16) : 90).⁵

Kedua, prinsip kebebasan beragama, penetapan prinsip ini merupakan jawaban terhadap situasi sosial penduduk Madinah yang memiliki keragaman komunitas agama dan

⁴ Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, (Depok: Rajawali Press :1994) 141-142.

⁵ Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012), 277.

keyakinan di kota itu.⁶ Prinsip ini sesuai dengan pasal ke 25 dalam piagam Madinah, serta bersesuaian dengan firman Allah yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha.”(Q.S. al-Baqarah(2) : 256).⁷

Ketiga, Prinsip tolong menolong antara umat muslim dan kaum yahudi, termaktub pada pasal 11-18.⁸

Keempat, Prinsip perdamaian antara muslim dan yahudi pada pasal 45.⁹ Prinsip ini sesuai dengan firman Allah ta’ala:

⁶Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, (Depok: Rajawali Press :1994), 169.

⁷ Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012), 42.

⁸ Pulungan, J. Suyuthi, 189.

وَأِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ... (٩)

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah” (QS. Al hujurat: 9).¹⁰

Kelima, Prinsip saling menghormati dalam hidup

bertetangga hal ini termaktub pada pasal 40-41 dalam piagam.

Dan prinsip ini sesuai dengan firman Allah :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا فَخُورًا (٣٦)

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

⁹ Pulungan, J. Suyuthi, 196.

¹⁰ Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012), 516.

yang sombong dan membangga-banggakan diri,” (QS. An-Nisa 3 : 36).¹¹

Multikulturalisme yang terkandung dalam Piagam Madinah ini adalah sebagai berikut:

- a. Persatuan dan persaudaraan
- b. Kebebasan beragama
- c. Tolong-menolong antara umat Islam dan kaum Yahudi
- d. Perdamaian antara Islam dan Yahudi
- e. Saling menghormati dalam hidup bertetangga

B. Relevansi Konsep Multikulturalisme Piagam Madinah terhadap Sistem Pendidikan Islam di Indonesia

Secara harfiah, pendidikan sebagai suatu Ilmu adalah semesta ide gagasan dan pemikiran manusia tentang pendidikan yang dapat direpresentasikan secara sistematis dan metodologis. Oleh sebab itu, konsep pendidikan sebagai suatu ilmu membentang seluas semesta pemikiran manusia tentang pengetahuan itu sendiri.

¹¹ Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012), 223.

Dalam dunia pendidikan secara umum. Paulo Freire sering menjadi sebuah wacana dialogis untuk menyelesaikan kebekuan dalam pendidikan. Bahkan ia dimonumenkan sebagai pahlawan pendidikan kritis (*the hero of critical education*). Salah satu teorinya dalam pendidikan yang paling masyhur adalah bahwa pendidikan untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Teori ini lebih condongan ke arah filosofi eksistensialisme yang berusaha menggagas konsep manusia dan seluk beluk persoalan melingkupinya.

Pendidikan Islam di Indonesia bermula dari berdirinya pondok pesantren. Dengan seiring berjalannya waktu kemudian mengalami perubahan yang cukup meningkat dengan mengikuti perkembangan zaman, pesantren yang dulunya hanya tempat pembelajaran keilmuan agama saja, kini telah berkembang dalam ranah yang lebih luas.

Pendidikan Islam yang lebih memfokuskan diri dengan mengadopsi pemahaman dan argumen agama sebagai dasar melangsungkan proses pembelajarannya, menjadi tawaran yang lebih diminati sebagai jawaban atas kebuntuan dan

kebutuhan manusia akan muatan-muatan ajaran yang berbau agamis dan mendekati ajaran-ajaran yang diyakininya dalam setiap praktek yang dijalankannya. Karena pendidikan Islam yang dibutuhkan sekarang ialah bagaimana manusia dapat mengerti dan dapat mengaktualisasikan ilmunya dalam segala bidang keilmuan yakni didasari oleh pondasi agama yang kuat, sehingga dapat hidup bersama dengan individu atau kelompok yang lain dalam masyarakat majemuk.

Adapun sistem pendidikan Islam di Indonesia dimulai pada Pada awal berkembangnya agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal pendidikan dan pengajaran Islam secara informal ini ternyata membawa hasil yang sangat baik sekali dan bahkan menakjubkan. Karena dengan berangsur-angsur tersiarlah agama Islam diseluruh kepulauan Indonesia, mulai sabang sampai Maluku. Sistem pendidikan Islam informal ini, terutama yang berjalan dalam keluarga sudah diakui keampuhannya dalam menanamkan sendi-sendi agama dalam jiwa anak-anak. Mereka dilatih membaca Al-Qur'an,

melakukan shalat dengan berjamaah, berpuasa dibulan ramadhan, dan lain-lain. Usaha-usaha pendidikan agama di masyarakat, yang kemudian dikenal dengan pendidikan non-formal, ternyata mampu menyediakan kondisi yang sangat baik dalam menunjang keberhasilan pendidikan Islam untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang lebih baik dan sempurna.¹²

Dalam bentuk permulaan, pendidikan agama Islam di surau atau di masjid masih sederhana. Tempat-tempat pendidikan yang seperti inilah yang menjadi bentuknya sistem pendidikan pondok pesantren dan pendidikan Islam yang formal yang berbentuk madrasah atau sekolah yang berdasarkan keagamaan. Pondok pesantren ini tumbuh sebagai perwujudan dari strategi umat Islam untuk mempertahankan eksistensinya terhadap pengaruh penjajah barat, akibatnya surau atau masjid ini dilengserkan dan tidak dapat menampung anak-anak yang ingin mengaji.

¹² Zuraini, (*Sejarah pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi aksara , 2008), 209.

Disamping itu juga didorong oleh keinginan untuk lebih maju pendidikan agama pada anak-anak, maka sang guru atau pak kyai dengan bantuan masyarakat memperluas bangunan di sekitar surau atau masjid untuk tempat mengaji sekaligus sebagai asrama bagi anak-anak. Dengan begitu anak-anak tak perlu bolak-balik pulang kerumah orang tua mereka. Tempat mengaji seperti ini disebut Pondok Pesantren.¹³

Sistem pendidikan islam mengalami perubahan sejalannya dengan perubahan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia. Kejayaan islam yang mengalami kemunduran sejak jatuhnya Andalusia kini mulai bangkit kembali dengan munculnya gerakan pembaharuan islam. Sejalan dengan itu pemerintah jajahan mulai mengenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur yang mulai menarik kaum muslimin untuk memasukinya. Oleh karena itu sistem pendidikan di surau, langgar, atau

¹³ Zuraini dkk, *Sejarah pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumiaksara, 2008), 212.

masjid dipandang sudah tidak memadai lagi dan perlu pembaharuan dan disempurnakan.¹⁴

Secara konseptual-normatif, pendidikan agama Islam (PAI) yang terdapat pada lembaga-lembaga pendidikan umum dimaksudkan sebagai upaya dalam membangun dan menumbuhkan sikap kebhinekaan berupa toleransi terhadap perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik. Meskipun sebenarnya hal ini bukan semata tanggung jawab pendidikan agama Islam, namun pendidikan agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan menanamkan sikap toleransi serta kesadaran menerima perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik.¹⁵

Namun realitanya, banyak kalangan yang menilai kegagalan pendidikan agama Islam dalam membangun dan menumbuhkan sikap toleransi dan kesadaran menerima

¹⁴ Zurainidkk, *Sejarah pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumiaksara, 2008,) 216.

¹⁵ Max Weber meyakini bahwa agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia dengan segala variasinya dari masyarakat sederhana sampai masyarakat maju sekalipun. Lihat Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), hlm. 1-28.

perbedaan etnis, budaya dan agama yang sesungguhnya bersifat manusiawi (humanis). Sikap kritis tersebut telah memunculkan wacana dan gagasan tentang perlunya memasukkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui dan menerima adanya kemajemukan sosial, budaya dan agama, namun dalam kenyataannya, permasalahan toleransi ini masih sering muncul dalam suatu masyarakat.¹⁶

Faktanya masih saja dijumpai perlakuan-perlakuan diskriminatif terutama dalam tatanan sosial-kemasyarakatan. Di kalangan umat Islam misalnya, selalu saja muncul sikap-sikap yang menunjukkan adanya kecurigaan dan sentimen terhadap terhadap orang-orang lain yang berbeda agama. Begitu juga dengan komunitas lain, seperti etnis china yang selalu tertutup dan hanya bergaul dengan sesama komunitasnya saja, dan lain- lain.

¹⁶ Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 21

Nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme berpengaruh signifikan dalam upaya membentuk pola pemahaman keagamaan di kalangan peserta didik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya tertuang dalam muatan kurikulum pendidikan agama Islam, namun juga tercermin dari pemahaman guru yang diaplikasikan dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses pendidikan agama Islam. Pandangan dan pemahaman yang positif bagi guru agama terhadap paham multikulturalisme pada gilirannya akan mampu mentransformasikan pola pemahaman.

Keagamaan yang inklusif di kalangan peserta didik. Pada posisi ini, pendidikan agama Islam memegang peranan kunci dalam menginternalisasikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme di kalangan peserta didik.¹⁷

Namun faktanya, menurut Siti Malika Towaf, kelemahan pendidikan agama Islam yang berlangsung saat ini, antara lain:

- a) Pendekatan masih cenderung normatif, di mana pendidikan agama menyajikan norma-norma yang

¹⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41

seringkali tanpa ilustrasi sosial-budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

b) Kurikulum yang dirancang hanya menawarkan minimum kompetensi, tetapi pihak guru PAI sering kali terpaku dengannya, sehingga kreativitas untuk memperkaya materi kurang tumbuh, begitu juga dalam hal penerapan metode pembelajaran yang cenderung bersifat monoton.¹⁸

Dalam konteks ini pendidikan agama Islam lebih diposisikan secara pasif (cenderung Jabbariyah yang *fatalisme*), sehingga pendidikan agama Islam sebagai suatu proses cenderung mengalami kebekuan dan kekakuan dalam implementasinya. *Output* yang dihasilkannya sudah pasti tidak relevan dengan konteks zaman alias tertinggal, bahkan tidak jarang bertabrakan dengan kondisi sosial yang ada dan dapat memicu terjadinya konflik horizontal.

Kenyataan ini paralel dengan fenomena yang terjadi baru-baru ini. Umat Islam khususnya di Indonesia kembali dibangunkan kesadarannya oleh isu-isu radikalisme dan terorisme dari suatu gerakan yang mengatasnamakan Negara

¹⁸ Siti Malika Towaf, "Pendekatan Kontekstual bagi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Basri (ed.), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 20

Islam Indonesia (NII). Menteri Agama Suryadharma Ali menilai, gerakan radikal Negara Islam Indonesia (NII) yang berkembang saat ini sangat sistematis dan intensif. Gerakan tersebut bahkan fokus merekrut mahasiswa, yang menjadi generasi penerus bangsa. Menurutnya, gerakan NII tak bisa dibiarkan.”Itu gerakan bawah tanah, dan kita harus basmi gerakan tersebut”.¹⁹

Radikalisme erat kaitannya dengan sikap intoleransi. Laporan survei Lakip menunjukkan 62,7 persen guru dan 40,7 persen siswa menolak berdirinya tempat ibadah non-Islam di lingkungan mereka. Sebanyak 57,1 persen guru dan 36,9 persen siswa juga menolak bertoleransi dalam perayaan keagamaan di lingkungan mereka. Lebih jauh lagi, dari hasil survei itu juga ditemukan fakta yang menarik bahwa 21,1 persen guru dan 25,8 persen siswa menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Guru dan siswa pun menganggap persoalan bangsa akan teratasi bila syariat Islam diterapkan di Indonesia (65 persen). Bahkan menurut hasil survei Lakip hampir 50 persen pelajar menyetujui tindakan radikal atas nama agama.²⁰

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan etnis, budaya dan agama yang

¹⁹ Ungkap Suryadharma kepada para wartawan di sela-sela acara Musrenbang Nasional 2011 di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis 28 April 2011.

²⁰ Hasil survei LaKIP yang ditulis M. Bambang pranowo, Direktur LaKIP, Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Lihat Koran *Tempo*, 2 oktober 2018.

selama terdapat dalam system pendidikan agama Islam masih jauh dari harapan. Dengan perkataan lain pemahaman keagamaan yang dibangun melalui proses pendidikan agama Islam masih jauh dari nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme yang merupakan bagian dari nilai-nilai humanism.

Indikasi kegagalan tersebut tidak terlepas dari peranan guru pendidikan agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada peserta didik. Ada sinyalemen bahwa pemahaman keagamaan yang dibangun selama ini melalui pendidikan agama berangkat dari suatu pandangan yang memposisikan “agama” sebagai sebuah ajaran yang bersifat absolut, statis dan baku. Konsekwensinya pemahaman dan pandangan terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme hanyalah sebatas pada tatanan wacana pemikiran kajiankeislaman, bahkan lebih ekstrim, muncul kecenderungan memaknainya sebagai sebuah propaganda Barat dalam upaya menyerang dan menghapus tradisi-tradisi Nabi dan Sahabat

yang selama ini secara konsisten dilestarikan oleh kelompok Islam fundamentalis.

Pendekatan pemahaman yang bercorak *tekstual-literal* yang cenderung tidak mempertimbangkan analisis historis, sosiologis, serta psikologis. Implikasinya adalah pemahaman terhadap Alquran maupun teks tafsir bisa bersifat dangkal dan mudah terjebak ke dalam sikap sosial yang *apologetik* dan *eksklusif*. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemahaman yang dihasilkan cenderung tidak memberi ruang toleransi, apresiasi, dan pengakuan terhadap pihak lain, utamanya pemeluk agama lain. Tentunya hal ini dapat menyulut sikap-sikap intoleran dan fanatisme buta yang pada akhirnya akan membuat rapuh *kohektivitas* sosial dan rentan konflik.

Sistem pendidikan agama Islam yang cenderung mengabaikan nilai-nilai humanisme yang plural dan multikulturalisme disebabkan paradigma tekstual- literal yang mendominasi sebagai landasan berpikir di kalangan guru-guru agama Islam.

Semangat multikulturalisme dalam Islam sangat terlihat jelas pada zaman Rosulullah. Di Madinah, Rasulullah melakukan sebuah transformasi sosial, di mana seluruh masyarakatnya hidup secara damai. Padahal saat itu masyarakat Madinah sangatlah plural, baik dalam agama, suku, bani maupun nasab. Konsep hidup bersama secara damai tersebut merupakan manifestasi dari kesepakatan bersama yang dikenal dengan “Piagam Madinah”.

Dalam konteks menghargai perbedaan Al Quran menyebutkan bahwa masing-masing agama dianjurkan untuk menjalankan ajaran agamanya, meskipun dilarang untuk mencampur adukkan antar syariat agama masing-masing. Surat al-Kafirun tampaknya contoh nyata implementasi dari toleransi beragama di tengah pluralitas. Dalam ayat terakhir Surat al-Kafirun disebutkan

“Untukmulah agamamu, dan untukulah agamaku”
(Q.S. Al Kafirun:6)

Jika Islam secara tegas menghargai keragaman manusia dan multikulturalisme, maka demikian juga dengan

Pendidikan Islam, yang mempunyai dasar Islam, yakni Alquran dan Sunnah. Serta tujuan yang sama dengan tujuan risalah Islam. Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa tujuan Islam berbanding lurus dengan sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya sangat mendukung semangat multikulturalisme. Hal ini didasari akan realitas masyarakat Islam yang terdiri berbagai kultur, bahasa, ras dan lainnya. Sehingga multikulturalisme nantinya akan menjembatani tercapainya tujuan Pendidikan Islam.

Di samping itu, Pendidikan Islam juga memahami bahwa masyarakat muslim juga hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang beragam. Di sini Pendidikan Multikultural nantinya mampu menjadi bekal bagi output Pendidikan Islam untuk mampu hidup bersama dalam realitas masyarakat yang plural secara damai dan beerkeadilan. Sudah selayaknya individu muslim menjadi “sponsor” terwujudkan toleransi antara keragaman budaya demi terciptanya masyarakat yang damai, sesuai tujuan Islam.

Meskipun dalam kenyatannya, praktik Pendidikan Islam seringkali menampilkan fenomena yang kontradiksi. Praktik Pendidikan Islam lebih menampilkan semangat fanatisme dan eksklusifisme. Sebagaimana yang diungkapkan Zakiyudin Baidhawiy, bahwa model pendidikan agama (termasuk Pendidikan Islam) selama ini tidak dimodifikasi oleh pluralisme demokrasi dan multikultural. Model tersebut menyembunyikan secara sistemik nilai saling menghargai (mutual respect) dari berbagai jalan hidup dan mengabaikan kontribusi kelompok-kelompok minoritas terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia.²¹ Yang terjadi kemudian output dari pendidikan itu sendiri tak jarang bersikap fanatik dan menganggap kelompok lain salah.

Realitas Pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren lebih menampilkan Islam sesuai dengan aliran yang diyakininya. Hal ini kemudian dimanifestasikan dengan berbagai kurikulum dan referensi (maraji') yang cenderung dari satu ideologi atau madzhab tertentu saja. Sedangkan

²¹ Zakiyudin Baidhawiy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 20

pendapat dan madzhab dari golongan lain sering kali ditinggalkan dan bahkan dianggap salah. Contoh riil adalah kurikulum Fiqih yang ada di Madrasah- madrasah yang beraliran *sunny*. Kurikulum yang diajarkan lebih cenderung berorientasi pada satu madzhab, yakni syafii. Peserta didik seakan-akan dilarang untuk mempelajari mazhab lain. Yang terjadi, terbangun pada sikap peserta didik bahwa *kaifiyah* fiqih yang tidak seperti yang pernah diajarkan, berarti salah.

Fenomena tersebut adalah sedikit contoh betapa praktik Pendidikan Islam seringkali menjauhkan diri dari semangat multiuklturalisme, yang sebenarnya adalah semangat Islam. Kedepan harus ada pergeseran yang berarti, baik itu melalui paradigma, kurikulum maupun operasionalisasi proses pendidikan. Pergeseran tersebut tentunya akan semakin mendekatkan diri pada semangat Islam yang menjunjung tinggi kedamaian dan keadilan.

Relevansi Konsep Multikulturalisme Piagam Madinah terhadap Sistem Pendidikan Islam di Indonesia diantaranya:

a. Memahami Keragaman Agama

Berbagai macam benturan dan konflik antar agama yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan, disinyalir karena faktor eksklusifisme beragama. Paradigma eksklusif memandang bahwa hanya agamanya lah yang paling benar, sehingga menganggap agama lain salah dan sesat. Biasanya, cara pemahaman terhadap ajaran agama paradigma ini, lebih bersifat tekstual dan normatif.²²

Paradigma keberagaman inklusif-pluralis berarti dapat menerima pendapat dan pemahaman agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan. Penerimaan pendapat ini tentu saja tidak harus diiringi dengan melaksanakan ajaran agama lain tersebut. Pemahaman keberagaman yang multikultural adalah menerima adanya keragaman ekspresi budaya dan keragaman keberagaman masyarakat agama yang lain. Pemahaman humanis mengindikasikan adanya pengakuan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama.

²² Doni Gahrial, *Pendidikan Memang Multikultural*; beberapa gagasan, (Jakarta; Sein Estetika dan Teknologi; SET, 2002) 3

Kemudian yang tidak kalah penting adalah membangun paradigma keberagaman inklusif kepada peserta didik di lembaga Pendidikan Islam atau sekolah. Sekolah sebagai wahana pembelajaran mempunyai peran penting dalam membangun keberagaman inklusif ini. Karena sekolah diyakini sebagai proses pembentukan jati diri peserta didik dan cara pandang dalam kehidupannya.²³ Dalam hal ini, beberapa langkah-langkah untuk membangun lingkungan sekolah yang pluralis dan toleran terhadap semua pemeluk agama, yaitu:

- 1) Sekolah membuat dan menerapkan aturan-aturan lokal, yakni aturan yang hanya khusus diterapkan di sekolah tersebut. Poin utama yang harus dicantumkan dalam aturan tersebut adalah pelarangan segala bentuk diskriminasi agama di sekolah tersebut. Harapannya adalah, supaya semua unsur yang ada di sekolah tersebut dapat menghargai orang lain yang berbeda agama.
- 2) Berperan aktif menggalakkan dialog antar agama. Hal ini dimungkinkan untuk membangun rasa saling pengertian

²³ Andre Attaujan, *Multikulturalisme belajar hidup bersama dalam perbedaan*, (Jakarta: PT Index, 2011), 98.

sejak dini antara siswa–siswa yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Yang pada akhirnya akan terjadi dialog dan komunikasi antar mereka yang berbeda agama.

- 3) Menyediakan dan menerapkan buku-buku yang heterogen, yang mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa yang berbeda agama.

Berikutnya, dalam proses pembelajaran, hal yang tidak bisa dilupakan adalah guru. Guru dalam hal ini mempunyai peran yang besar dalam rangka membangun keberagaman inklusif pada siswa (peserta didik). Guru harus berupaya membangun cara beragama inklusif kepada peserta didik. Beberapa hal yang harus diperhatikan seorang pendidik dalam konteks ini antara lain.

- 1) Guru harus mampu untuk bersikap demokratis. Artinya dalam segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataan, tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik yang berbeda agamanya.
- 2) Guru seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada

hubungannya dengan agama. Sebagai contoh, ketika terjadi pengeboman terhadap salah satu kafe di Bali (Bom Bali I, 2003), maka guru harus mampu menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan perilaku agama. Guru harus mengungkapkan keprihatinannya, dan berharap kejadian itu jangan sampai terulang lagi.²⁴

b. Memahami Keragaman Bahasa

Diskriminasi bahasa, seringkali terjadi dalam masyarakat. Masyarakat menilai bahwa ada semacam “stratifikasi” bahasa di masyarakat. Sebagai contoh ada yang menganggap bahwa bahasa Jawa (khususnya Banyumasan) itu terkesan kasar dan rendah. Dan yang harus dipahami bahwa setiap masyarakat pengguna bahasa akan selalu menilai bahwa bahasanya yang paling baik dan tinggi. Di sinilah kesadaran multilingual menjadi prasyarat yang tidak boleh dilupakan. Pendidikan Islam dalam hal ini harus mampu membangun kesadaran multilingual di tengah masyarakat, khususnya

²⁴ Zakiyudin Baidhaw, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 28.

kepada peserta didik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membangun kesadaran kepada peserta didik agar bersikap positif terhadap keragaman bahasa. Dengan demikian, diharapkan bahwa kelak mereka akan menjadi generasi yang mampu melestarikan keragaman bahasa, yang merupakan warisan budaya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan seorang pendidik dalam rangka membangun pemahaman keragaman bahasa, yaitu:

- 1) Guru harus mempunyai wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keragaman bahasa.
- 2) Guru harus mempunyai sensitifitas tinggi terhadap masalah- masalah yang menyangkut adanya diskriminasi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Peran lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan hal ini adalah menerapkan Undang-undang atau peraturan lokal tentang pelarangan diskriminasi terhadap bahasa tertentu. Diskriminasi tersebut bisa berupa, menertawakan, mengejek, merendahkan bahasa orang lain

c. Membangun Sensivitas Gender

Bias gender sampai sekarang masih mewarnai kehidupan dimasyarakat. Dalam hal ini, perempuan lah yang menjadi objek bias tersebut. Subordinasi terhadap perempuan, diskriminasi, dan bahkan kekerasan menjadi fenomena gunung es, yang tampak kecil di permukaan. Di sinilah tantangan terhadap Pendidikan Islam untuk melakukan upaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Membangun sensitivitas gender adalah upaya real untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut.²⁵

Lembaga pendidikan Islam sebagai manifestasi dari proses pendidikan Islam, dituntut untuk mampu melakukan transformasi nilai menuju kesetaran gender. Dalam hal ini, lembaga Pendidikan Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempunyai dan menerapkan peraturan sekolah yang melarang adanya diskriminasi gender.
- 2) Lembaga pendidikan Islam harus berperan aktif untuk

²⁵ Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 29.

memberikan pelatihan gender, terhadap semua unsur yang ada di sekolah tersebut, baik guru, murid, pegawai staf administrasi. Hal ini dimaksudkan agar penanaman nilai-nilai tentang persamaan hak, serta sikap anti diskriminasi gender dapat berjalan dengan efektif

- 3) Mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kesetaraan gender.

Sedangkan guru yang nota benenya mempunyai peran penting dan “*centre*” proses belajar mengajar di antaranya sebagai berikut:

- 1) Guru mempunyai wawasan yang luas tentang wacana kesetaraan gender. Hal ini dimaksudkan supaya guru mampu bersikap adil dan tidak diskriminasi terhadap peserta didik perempuan maupun laki-laki.
- 2) Mempunyai tindakan dan sikap anti diskriminasi gender. Yaitu mampu mempraktekkan nilai-nilai kesetaraan gender secara langsung di kelas dan sekolah
- 3) Sensitif terhadap permasalahan gender.

d. Memahami Keragaman Status Sosial

Keragaman status sosial di masyarakat, biasanya diiringi dengan perilaku yang tidak adil. Di satu sisi, masyarakat menghormati dan memberikan tempat yang lebih kepada seseorang yang mempunyai jabatan tinggi. Sebaliknya, orang yang miskin sering kali dipandang sebelah mata. Demikian juga di lingkungan sekolah, guru sering kali berlaku tidak adil kepada peserta didik, karena status sosial yang dimiliki orang tua peserta didik tersebut. Pendidikan Islam yang visi keadilan sangat menentang perlakuan tidak adil tersebut.²⁶ Ada beberapa hal yang harus dilakukan lembaga pendidikan Islam dalam rangka membangun pemahaman tentang keragaman status sosial ini, di antaranya:

- 1) Memberlakukan peraturan sekolah tentang larangan perilaku diskriminasi dan ketidakadilan. Disini semua siswa harus diperlakukan sama, tidak memandang kedudukan, setting sosial peserta tersebut. Demikian juga, semua peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang sama.

²⁶ Ngainun Nga'im, Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 89.

- 2) Membangun sikap kepedulian sosial terhadap rakyat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial dan politik. Di antaranya mengadakan aksi sosial, baik itu berupa bakti sosial, sumbangan dan lainnya terhadap masyarakat marjinal.
- 3) Menerapkan kurikulum yang tidak hanya di rancang untuk pemenuhan kemampuan kognitif (ilmu pengetahuan) tetapi juga meningkatkan kemampuan afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan).

Sedangkan upaya yang bisa dilakukan pendidikan dalam kaitannya dengan hal ini adalah:

- 1) Mempunyai wawasan yang cukup tentang fenomena-fenomena sosial yang ada di lingkungan peserta didik.
- 2) Mempunyai sensitifitas terhadap adanya diskriminasi dan ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik.
- 3) Menerapkan secara langsung sikap peduli dan anti diskriminasi sosial, politik dan ekonomi di kelas, maupun di sekolah.

e. Memahami Keragaman Etnis

Keragaman etnis yang sangat majemuk di Indonesia, adalah tantangan kerukunan masyarakat. Terbukti, akhir-akhir ini konflik dan kerusuhan yang bertemakan etnis muncul kembali.²⁷ Sehingga perlu dibangun pemahaman bersama tentang keragaman etnis. Pendidikan Islam juga tidak bisa menutup mata atas hal ini. Pendidikan Islam harus memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat akan keberagaman etnis. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian lembaga pendidikan Islam, kaitannya dengan pembangunan kesadaran multietnis adalah:

- 1) Membuat dan memberlakukan peraturan sekolah tentang pelarangan diskriminasi dan saling merendahkan antar etnis. Sekolah tidak boleh membeda-bedakan latar belakang etnis peserta didik.
- 2) Berperan aktif dalam membangun pemahaman dan kesadaran peserta didik akan keragaman etnis. Misalnya, dengan mengadakan kajian dan dialog antar etnis, yang

²⁷ Zakiyudin Baidhaw, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 28.

diharapkan akan mampu menjalin hubungan yang harmonis antar siswa yang berbeda etnis

- 3) Memberikan pelatihan, untuk memahami keragaman etnis, dan bersikap adil, anti diskriminasi terhadap suatu etnis tertentu.

Di samping itu peran pendidik juga harus dioptimalkan.

Hal-hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam hal ini adalah:

- 1) Memiliki wawasan dan pemahaman tentang keragaman etnis.
- 2) Memiliki sensitifitas yang kuat terhadap gejala-gejala diskriminasi etnis, yang terjadi di kelas maupun di luar kelas.
- 3) Dapat memberikan contoh secara langsung melalui sikap dan tingkah lakunya yang tidak memihak dan berlaku adil terhadap siswa dari etnis apapun.

f. Menghargai Kerbedaan Kemampuan

Manusia diciptakan dengan bentuk kemampuan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut, bukan merupakan ukuran kemuliaan seseorang. Namun perbedaan kemampuan tersebut

seringkali menjadi lahan subur praktik diskriminasi dan ketidakadilan.²⁸ Pendidikan Islam menegaskan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai derajat yang sama, meskipun mempunyai kemampuan yang berbeda. Perbedaan dalam hal ini merupakan fenomena yang menjadi perhatian pendidikan Islam. Harapannya, penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama, serta diperlakukan sama dalam masyarakat. Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu memberikan pemahaman tentang perbedaan kemampuan. Beberapa hal yang bisa dilakukan lembaga pendidikan Islam dalam hal ini adalah:

- 1) Membuat dan memberlakukan peraturan sekolah yang menekankan bahwa sekolah tersebut menerima para peserta didik yang normal dan mereka yang mempunyai kemampuan berbeda (disabilitas). Aturan tersebut juga harus melarang perlakuan diskriminasi, baik bagi siswa yang *disabilitas* maupun yang *non disabilitas*.
- 2) Menyediakan kebutuhan dan pelayanan khusus bagi siswa

²⁸ Zakiyudin Baidhawiy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 32.

yang mempunyai kemampuan yang berbeda.

- 3) Menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa *diffable* dan *non diffable*. Kurikulum ini nantinya menekankan pada semangat untuk belajar dan hidup bersama, saling memahami, menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya.
- 4) Memberikan pelatihan bagi guru, bagaimana bersikap dan cara menghadapi peserta didik yang *diffable* dan *non diffable* di sekolah tersebut.

Sedangkan upaya yang dilakukan guru dalam hal ini adalah:

- 1) Mempunyai wawasan dan pemahaman tentang pentingnya sikap anti diskriminasi terhadap peserta didik yang mempunyai perbedaan kemampuan.
- 2) Menjadi penggerak utama kesadaran siswa agar selalu menghindari sikap diskriminasi terhadap *diffable*.
- 3) Mempunyai sensitifitas yang tinggi apabila melihat adanya diskriminasi yang berkaitan dengan adanya perbedaan kemampuan.

g. Memahami Keragaman Umur

Perbedaan umur bukanlah sebuah alasan untuk bersikap tidak adil. Seringkali, orang memandang bahwa semakin usianya tinggi, semakin pintar dan berisi seseorang. Sehingga memandang rendah seseorang yang usianya di bawahnya. Dalam lembaga pendidikan juga menganjurkan untuk memperlakukan peserta didik secara sama. Islam, sebagai acuan dasar pendidikan Islam menyatakan bahwa belajar atau menuntut ilmu itu seumur hidup. Tidak ada kata terlambat untuk belajar.²⁹

Di sini Lembaga pendidikan Islam harus menerapkan peraturan yang menyatakan larangan keras diskriminasi umur. Sekolah tidak membatasi batasan umur bagi seseorang yang hendak belajar di sekolah tersebut, dengan tetap berorientasi pada aturan pemerintah yang berlaku. Sedangkan guru dituntut mempunyai wawasan yang cukup tentang arti pentingnya anti diskriminasi.

²⁹ Zakiyudin Baidhaw, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 65.